EFEKTIVITAS SISTEM PERPARKIRAN DALAM UPAYA PENINGKATAN HASIL RETRIBUSI PARKIR KOTA BANDAR LAMPUNG (Study Kasus Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)

(skripsi)

Oleh

SATRIA SAKTI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018

ABSTRAK

Efektivitas Sistem Perparkiran Dalam Meningkatkan Hasil Retribusi Parkir Kota BandarLampung (Study Kasus Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)

Oleh : Satria Sakti

Kota BandarLampung merupakan salah satu daerah yang Efektivitas retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum belum maksimal dalam merealisasikan target yang ingin dicapai. Berdasarkan data pada tahun 2016 ditetapkan target Rp. 6.600.000.000 hanya terealisasi sebesar Rp. 4.306.501.000.

Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang efektivitas sistem perparkiran tepi jalan umum dalam upaya peningkatan PAD khususnya terhadap retribusi parkir di Kota BandarLampung. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil dalam penelitian ini ialah: evektivitas sistem perparkiran dalam upaya meningkatkakan hasil retribusi parkir kota BandarLampung belum terlaksana dengan cukup baik karena disebabkan oleh beberapa hal yaitu : a. Kurangnya pengawasan terhadap petugas parkir dilapangan. b. Terjadi kerjasama antara petugas parkir liar dan oknum tertentu yang memiliki peranan. c. Tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat untuk menigkatkan kesadaran masyarakat meningkat. d. Alokasi anggaran untuk biaya operasional yang digunakan untuk menjalankan tugas sehari-hari tidak ada. e. Petugas parkir dilapangan banyak menjalankan tugas tanpa mengikuti Perwali No. 83. f. Kurang memadai prasarana yang dimiliki.

Kata Kunci: Efektivitas, PAD, Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum

ABSTRACT

The Effectiveness of Parking System in Improving the Levy of BandarLampung Town Parking (Case Study of Transportation Department of Bandar Lampung Town)

By: Satria Sakti

BandarLampung city is one of the areas that the effectiveness of retribution parking service on the roadside public has not been maximized in realizing the target to be achieved. Based on data in 2016 set target Rp. 6,600,000,000 only realized Rp. 4,306,501,000.

Therefore, this study aims to describe and analyze the effectiveness of street parking system public in an effort to increase LGR, especially on parking fees in BandarLampung . The type of research is descriptive research with qualitative approach.

The results of this study are: parking station evaptivity in an effort to increase the levy of BandarLampung city parking levy has not been done well enough because it is caused by several things, namely: a. Lack of supervision on parking attendants in the field. b. There was cooperation between the illegal parking officers and certain individuals who had a role. c. The lack of socialization to the community to boost public awareness increases. d. The budget allocation for operational costs used to perform daily tasks does not exist. e. Parking officers in the field run many tasks without following regulation of mayor No. 83. f. Insufficient infrastructure owned.

Keywords: Effectiveness, PAD, Retribution of Public Road Parking Service

EFEKTIVITAS SISTEM PERPARKIRAN DALAM UPAYA PENINGKATAN HASIL RETRIBUSI PARKIR KOTA BANDAR LAMPUNG (Study Kasus Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)

Oleh

Satria Sakti

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA

Pada

Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018

Judul Sripsi : **Efektivitas Sistem Perparkiran Dalam Upaya Meningkatkan Hasil Retribusi Parkir Kota BandarLampung (Studi Kasus Dinas Perhubungan Kota BandarLampung)**

Nama Mahasiswa : *Satria Sakti*

No. Pokok Mahasiswa : 1416041089

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Politik dan Ilmu Sosial

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Yulianto, M.S
NIP. 19610704 198803 1 005

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Dr. Noverman Duadji, M.Si
NIP.19691103 200112 1002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Yulianto, M.S** .....

Penguji Utama : **Dr. Bambang Utoyo S, M.Si** .....

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Dr. Syarief Makhya
NIP. 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **8 Juni 2018**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi/Laporan akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana/Ahli Madya), baik Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.

2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.

3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Bandar Lampung, 7 Juni 2018

Yang membuat pernyataan,

METERAI TEMPEL
0F56FAFF021301105
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Satria Sakti
NPM. 1416041089

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kota Bumi pada tanggal 23 Seftember 1995, sebagai anak ke tiga dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Sukiman dan Ibu Dalina. Pada tahun 2002, penulis menyelesaikan pendidikan taman kanak-kanak di TK Islam Ibnurusyd, kemudian melanjutkan pendidikan dasar di SD Islam Ibnurusyd Kota Bumi dan lulus pada tahun 2008. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan menengah di SMP Negeri 7 Kota Bumi, kemudian pada tahun 2011 penulis melanjutkan pendidikannya ke SMA Negeri 3 Kota Bumi dan lulus tahun 2014. Penulis diterima sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Lampung pada tahun 2014 melalui jalur tes tertulis Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Pada bulan Januari-Februari 2017, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Negeri Katon, Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah dengan tema “Pemberdayaan Kampung Berbasis Teknologi”. Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah mengikuti organisasi internal kampus diantaranya : Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA) sebagai anggota bidang hubungan luar (Hublu) dan organisasi eksternal kampus

diantaranya : Badan Eksekutif Mahasiswa sebagai staf pada kementrian aksi dan propaganda (Akspo).

MOTTO

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan"

(QS. 94:6)

"Bersyukurlah atas apa yang Anda miliki agar Anda bahagia"

(Mario Teguh)

"Dekati Allah dalam kelapangan dan kesempitan. Ingatlah di setiap bahagia dan sedih kita. Jangan pernah melupakan-Nya dan jangan pernah ingatan kepada-Nya kalah oleh ingatan untuk seseorang."

(Panji Ramdana)

"Menuntut ilmu adalah taqwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad,"

(Imam Al Ghazali).

PERSEMBAHAN

Bissmillahirrohmanirrohim

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan yang telah memberikan kesempatan sehingga dapat kuselesaikan sebuah karya ilmiah ini dan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan Syafaatnya di hari akhir kelak.

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Bapak & Ina tercinta

Dua Kakak ipar ku & dua kakak Perempuan ku serta keponakan ku tersayang

Terima kasih untuk semua dukungan baik moril maupun materil, kasih sayang dan segala doa untukku.

Untuk keluarga besarku, sahabat-sahabatku dan juga teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan dukungan dan motivasi serta menemaniku dalam suka maupun duka dalam mencapai keberhasilanku.

Para pendidik dan Almamater tercinta...

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Efektivitas Sistem Perparkiran Dalam Upaya Peningkatan Hasil Retribusi Parkir Kota Bandar Lampung (Studi Kasus Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)", sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Administrasi Publik (S.AP) di Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain:

1. Terimakasih untuk kedua orang tuaku, Ayahanda Sukiman dan Ibunda Dalina. Terima kasih atas kasih sayang yang telah Bapak dan Ina berikan kepadaku, terimakasih atas semua do'a, motivasi, pengorbanan, didikan yang selama ini kalian berikan kepadaku hingga aku bisa menjadi seperti sekarang ini. Terimakasih atas kepercayaan dan amanat yang selama ini kalian berikan kepadaku untuk menyelesaikan studiku sehingga aku bisa mencapai gelar Sarjana Administrasi Publik. Semoga dengan mendapatkan gelar S.AP ini aku bisa membahagiakan Bapak dan Ina, Amin.
2. Kakak ipar ku Reza Putra Bangsawan.,S.E dan Angga Mulyadi.,S.E serta kakak perempuan ku Silvilia Volesta.,S.ST dan Suci Natalia.,S.Si tak lupa

juga keponakan ku Afiqa Putri Bangsawan yang telah mendoakan dan memberi semangat.

3. Bapak Prof. Dr. Yulianto, M.S selaku dosen pembimbing utama. Terima kasih pak atas bimbingan dan motivasi serta masukannya yang banyak membantu dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga ilmu yang telah diberikan selama perkuliahan. Penulis memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan penulis yang sekiranya kurang berkenan.
4. Bapak Izzul Fatchu Reza, S.AN, M.PA selaku dosen pembimbing kedua. Penulis mengucapkan terima kasih atas motivasi, saran dan bimbingannya yang sangat banyak membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi. Penulis juga memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan penulis yang sekiranya kurang berkenan.
5. Dr. Bambang Utoyo S, M.Si. selaku dosen penguji. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala ilmu yang diberikan serta masukan, saran dan bimbingannya yang telah banyak membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi. Penulis juga memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan penulis yang sekiranya kurang berkenan.
6. Bapak Syamsul Ma’arif,S.IP.,M.Si selaku dosen pembimbing akademik. Terimakasih pak atas nasehat, arahan, motivasi dan ilmu yang diberikan selama proses pendidikan hingga saat ini.
7. Bapak Dr. Noverman Duadji, M. Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

8. Ibu Intan Fitria Meutia, M.A., Ph.D selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
9. Kepada seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Ibu Selvi, Ibu Dewi, Ibu Ita, Ibu Devi, Ibu Dian, Ibu Novita, Pak Eko, Pak Nana, Pak Bambang, Pak Syamsul, Ibu Meiliyana, Ibu Rahayu, terimakasih banyak untuk semua ilmu yang telah diajarkan kepada penulis.
10. Pak Juhari dan Pak Ashari selaku staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang selalu membantu dalam hal administratif. Terimakasih atas kesabaran dan kesediaannya selama ini.
11. Segenap Informan Penelitian di Dinas Perhubungan Kota Bandarlampung: Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Afruly Rahmat,AT, S.Sos.,MM selaku Kepala Bidang Perparkiran, Bapak Muhaimin. SH.,MM selaku Kepala Seksi Pendataan Perparkiran, Bapak Hartono Ali, S.E, M.M selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Penertiban Parkir, Bapak Ahmad Ronni Skil, SE.,MM selaku Kepala Seksi Perparkiran, Bapak Wahab selaku petugas parkir Pasar Gintung, Bapak Burhan selaku petugas parkir Pasar Tengah, Bapak Ain Kurni selaku petugas parkir Pasar Tengah Teluk Betung, Bapak Yanto selaku pengguna parkir Pasar Tengah. Penulis mengucapkan terimakasih kepada bapak dan ibu atas informasi dan juga data-data, bantuan, izin, dan juga waktu luang yang telah diberikan kepada penulis, penulis merasa sangat terbantu dengan bantuan-bantuannya dalam proses turlap, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

12. Sahabatku yang selalu menemani selama 4 tahun di jurusan Ilmu Administrasi Negara yaitu Koko Sandi (Bos batu bata) terimakasih ko untuk semangatnya, dukungannya selama 4 tahun ini, semoga kita sama-sama sukses.Amin., Deni Saputra (Si tangan kanan arinal juanedi semoga arinal menang jadi gubernur ya den biar lo diangkat jadi kepala dinas perhubungan. amin) Tengku Abdi Pratama (punya cita-cita jadi walikota metro, semoga niat baiknya dijabah oleh allah swt. Amin) Wahyu Hidayat (ngfans berat sama jkt48) Herwan Dovika (pak ketua mpm moga lulusnya jadi ketua mpr beneran gantiin pak zulkifli hasan. Amin) Alvin Prasetyo (moga cepet jadi kasat narkoba polres lampung timur) Hariska Putra (si penjaga hati wanita yang dia sayangi. Katanya sihhh haha!!!!) Indra Yunizar (moga pacarannya ga sia-sia sama titi. amin) Pranita Miharti, nabila aisyah, martiana, athiya (makasih ya selama jaman kuliah sering bantuin kalo ada tugas, sering ngasih saran & masukan sukses selalu buat kalian ber4) Dian Suci Pratiwi & Ari Novita Sari (makasih udah luangin waktunya buat bantuin persiapan seminar hasil & pasca seminar hasil semoga allah membalas kebaikan kalian). Terimakasih atas canda tawa kalian semua yang nantinya bakal bikin kangen, kalian adalah sahabat terbaik.
13. Gelas Antik (Adi Black, Adi kurniawan, Alvin, Ana, Andra, Andriyanto, Anggi Lestari, Anggi Setiawan, Annisa Yurida, Vita, Arif, Arizal, Astri, Bella, Binter, Daiska, Desriyanto, Desy, Dian, Dinda, Ditho, Sari, Anung, Ely, Adon, Fadly, Faiz, Fatra, Riany, Ferdian, Ferry, Gusty, Herwan, Hiro, Holil, Idris, Istiqomah,Istie R, Rian,Tije, Julian, Reza, Meli, Mia, Fazry, Ma’ruf, Ara, Nabila Cho, Nadya, Ni’mah, Nihan, Niza, Fungki, Nur Arifah,

Asih, Hasan, Idin, Laila, Oci, Okta, Rani, Refi, Regi, Rifki, Ririn, Robi, Roi, Rydho, Sandi, Sangga, Satria, Septika, Sintong, Sisca, tanicha, Taufik, Tengku, Tiyasz, Trias Cininta, Triaz, Tuti, , Wahyu Syawaldi, Widi, Yumas, Heni, Nur Muharany, Anisa Utami, Yunia, Dira, Sondang Gustina, Megita, Fatwa, Suchi Latifah). Serta keluarga besar Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara terutama untuk Gelas Antik yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas segala kebersamaan dan dukungannya selama proses perkuliahan. Semoga kita sukses semua, Amin.

14. Teman-teman KKN desa Negri Katon. Terimakasih atas pengalaman berharga selama 40 harinya.
15. Sahabat SMA. Ari Setia Bekti, Seftian Hidayat, Farhan Firdausi, Angga Pratomo, Fitra Yuda Jaya Tama, Jamaludin Azhar. Terimakasih untuk saling support selama ini, tetap semangat dalam meraih cita-cita.
16. Teman- teman Kostan RH 1. Bang Edo, Yuda, Adrian, Faisal, Reja, Anggit, Arnel, Alif, Rijal, Riki, Wahidin, Anjar, Devin, Riko, Sita, Putri, Diki, Agung Ngurah. Bapak Kost, Bori. Terimakasih atas canda & tawa selama ini semoga sukses mengiringi kita semua, Amin.
17. Seluruh pihak yang membantu penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis ucapkan terimakasih untuk semuanya.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak, Semoga sebuah karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Bandarlampung, Mei 2018

Penulis

Satria Sakti

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ..... **I**

DAFTAR GAMBAR ..... **Ii**

I. PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 7

II. TINJAUAN PUSTAKA **8**

A. Tinjauan Tentang Efektivitas..... 8

1. Pengertian Efektivitas 8

2. Jenis-Jenis Efektivitas..... 10

3. Kriteria Efektivitas Organisasi..... 11

B. Tinjauan Tentang Keuangan Daerah..... 13

C. Sumber-Sumber Keuangan Daerah..... 14

D. Tinjauan Tentang PAD..... 17

E. Tinjauan Tentang Retribusi..... 19

1. Pengertian Retribusi 19

2. Penggolongan Retribusi..... 21

3. Kebijakan Umum Perparkiran di Kota Bandar Lampung..... 22

F. Tinjauan Tentang Perparkiran..... 24

1. Fasilitas Parkir..... 24

2. Penggolongan Parkir Berdasarkan Status..... 26

G. Keaslian Penelitian..... 27

H. Kerangka Pikir..... 29

III. METODE PENELITIAN 32

A. Tipe Dan Pendekatan Penelitian 32

B. Fokus Penelitan 33

C. Lokasi Penelitian 36

D. Informan Penelitan..... 36

E. Jenis Sumber Data 37

E. Teknik Pengumpulan Data 39

F. Teknik Analisi Data 41

G. Teknik Keabsahan Data 43

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 46

A. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung..... 46

1. Profil dan Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung..... 46

2. Visi-Misi Dinas Perhubungungan Kota Bandar Lampung..... 47

3. Tujuan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung..... 49

4. Sasaran Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung..... 50

5. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung 50

6. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung 51

B. Sistem Pemungutan Retribusi Parkir..... 60

C. Hasil dan Pembahasan Penelitian..... 61

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai..... 63

2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan..... 68

3. Proses analisa dan perumusan kebijaksanaan..... 74

4. Perencanaan yang matang..... 76

5. Penyusunan program yang tepat..... 78

6. Tersedianya sarana dan prasarsana kerja..... 89

7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien..... 93

8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik..... 96

V. KESIMPULAN DAN SARAN 101

A. Kesimpulan 101

B. Saran 102

DAFTAR PUSTAKA 104

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

1. Data Pendataan Retribusi Parkir Pertahun.....4
2. Matrik Perbandingan Penelitian.....27
3. Informan Penelitian.....37
4. Daftar Dokumen.....39
5. Observasi Penelitian.....40
6. Kriteria Efektivitas.....45
7. Jumlah Karyawan.....53
8. Retribusi Parkir Zona I.....81
9. Retribusi Parkir Zona II.....83
10. Jumlah Kendaraan Roda Dua Kota Bandar Lampung.....94
11. Jumlah Kendaraan Roda Empat Kota Bandar Lampung.....94

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR **HALAMAN**

1. Gambar Kerangka Pikir.....31

2. Gambar Alur Pemungutan Retribusi Parkir.....60

3. Gambar Apel Pagi.....64

4. Gambar Surat Perintah Tugas.....69

5. Gambar Rapat Evaluasi.....93

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan setiap pemerintah di seluruh negara di dunia membutuhkan pendanaan. Pendanaan tersebut disusun dalam suatu anggaran. Di Negara Indonesia anggaran selama satu tahun dalam melaksankan roda pembangunan disebut Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Adapun di tingkat daerah, anggaran untuk pembangunan selama satu tahun dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sumber-sumber penerimaan APBD berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari pungutan daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan tersebut harus ditingkatkan seoptimal mungkin dalam rangka mewujudkan semangat kemandirian lokal. Mandiri diartikan sebagai semangat dan tekad yang kuat, untuk membangun daerahnya sendiri dengan tidak semata-mata menggantungkan pada fasilitas atau faktor yang berasal dari luar.

Meskipun dimaklumi sebagian besar daerah otonomi (Kabupaten/Kota) kemampuan PAD-nya kecil, sehingga masih diperlukan bantuan keuangan dari

pemerintah pusat. Meskipun tingkat ketergantungan keuangan daerah otonom terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi (kuat), namun diharapkan kepada setiap daerah otonom untuk mengidentifikasi seluruh potensi sumber-sumber PAD yang dimiliki untuk ditingkatkan secara intensif.

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Berdasarkan pendapat tersebut, diketahui bahwa retribusi adalah pungutan yang berkaitan atas jasa fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada masyarakat.

Retribusi daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari rumah tangga privat berdasarkan norma-norma umum yang ditetapkan, berhubungan dengan prestasi yang diselenggarakan dan untuk kepentingan masyarakat secara khusus yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat publik Goedhart (1982:109)

Agar Pemerintah Daerah dapat optimal dalam menggali penerimaan daerah, makapemerintah pusat menggolongkan jenis-jenis penerimaan daerah berdasarkan Undang Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, salah satu sumber-sumber penerimaan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut.

a. Hasil Pajak Daerah

b. Hasil Retribusi Daerah

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan, dan

d. Lain-lain PAD yang sah.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dapat terus dioptimalkan adalah retribusi daerah. Retribusi daerah sifatnya lebih beragam dan bervariasi semakin berkembangnya suatu daerah, maka semakin banyak pula jasa pelayanan yang disediakan pemerintah daerah setempat untuk mengembangkan perekonomian masyarakat.

Kegiatan pemungutan retribusi tersebut dilakukan berdasarkan aturan hukum yang telah ditetapkan, yang bertujuan untuk memberikan timbal balik yang lebih kepada masyarakat. Obyek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang disediakan pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, namun hanya jenis jasa tertentu menurut pertimbangan sosial ekonomi yang layak untuk dijadikan objek retribusi.

Pemungutan retribusi parkir diatur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 bab IX pasal 160 yang berbunyi bahwa retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, dokumen yang dipersamakan tersebut berupa karcis, kupon, dan kartu langganan, dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 7% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang tertuang atau kurang dibayar dan ditagih dengan mengunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD), penagihan retribusi

sebagaimana yang dimaksud sebelumnya didahului surat teguran, tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Salah satu sumber penerimaan retribusi daerah yang cukup besar dalam menyuplai Pendapatan Asli Daerah adalah retribusi parkir. Pemungutan retribusi parkir di Kota Bandar Lampung diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 pasal 24, yang berbunyi "Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dipungut pembayaran atas penyedian tempat parkir di tepi jalan umum yang di tentukan atau di selenggarakan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan". Parkir di tepi jalanan umum sudah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah Kota Bandar Lampung melalui peraturan yang telah ditetapkan. Namun pelaksanaan yang dilakukan pemerintah belumlah maksimal. Hal tersebut terlihat dari target yang di tetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung belum mencapai target hal tersebut terlihat dari data yang di peroleh oleh peneliti dari Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. Data Pendapatan Pertahun Retribusi Parkir Di Tepi Jalanan Umum Kota Bandar Lampng

NO.	TAHUN	TARGET RETRIBUSI	PENDAPATAN RETRIBUSI	PERSENTASE
1.	2014	Rp. 6.600.000.000	Rp. 4.925.028.400	70%
2.	2015	Rp. 6.600.000.000	Rp. 5.128.277.000	72%
3.	2016	Rp. 6.600.000.000	Rp. 4.306.501.000	65%

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa tahun 2014 hingga tahun 2016 target pendapatan retribusi parkir yang telah ditetapkan tidak pernah berubah hal tersebut kaerana potensi yang dimiliki tidak pernah berubah target penerimaan retribusi parkir

tidak pernah tercapai karena berbagai permasalahan seperti yang diterangkan oleh Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Bapak Afruly, S.Sos., M.M. diantaranya sebagai berikut.

Pertama, gaya kepemimpinan dari dalam internal kurang tegas, contohnya Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung yang membiarkan para pegawai datang tidak tepat waktu dan kembali kerumah ketika waktuya belum tiba sehingga pekerjaan yang dilakukan para pegawai terkesan kurang maksimal, serta kurangnya pelatihan yang diberikan pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Kedua, banyaknya lahan parkir yang dijadikan tempat berdagang oleh pedagang kaki lima, contohnya yang terjadi di pasar bambu kuning sehingga lahan yang biasanya dijadikan tempat pemungutan retribusi parkir menjadi tersita sebagian oleh pedagang kaki lima, dan para pegawai dinas pehubungan terkesan mendiamkan hal tersebut.

Ketiga, kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah di beberapa tempat menyebabkan hilangnya lahan tempat pemungutan retribusi parkir, contohnya seperti perluasan badan jalan yang terjadi di Jalan Imam Bonjol, sehingga tempat yang biasanya dijadikan objek pemungutan retribusi parkir menjadi hilang sebagian.

Keempat, banyaknya lahan yang dikuasai oleh preman pada jam tertentu contohnya di area pasar bambu kuning, dan candra tanjung karang sehingga pendapatan retribusi parkir tersebut tidak disetorkan seutuhnya kepada pemerintah melainkanberalih kepada preman-preman tersebut, hal tersebut dapat terjadi karena adanya kerjasama antara pihak dinas perhubungan dan para preman.

Kelima, beralih fungsinya lahan yang sebelumnya di jadikan tempat pemungutan retribusi parkir menjadi tempat pemungutan pajak parkir, contohnya pembangunan rumah makan di Jalan Ikan Kakap yang menyebabkan para pengguna tempat parkir enggan untuk parkir di tepi jalan melainkan parkir di halaman rumah makan.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Efektivitas Sistem Perparkiran Dalam Meningkatkan Hasil Retribusi Parkir Kota Bandar Lampung (Study Kasus Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Mengapa target pendapatan retribusi parkir yang di tetapkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung tidak pernah mencapai angka yang telah ditetapkan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuannya di lakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis apa yang menyebabkan target pendapatan retribusi parkir yang di tetapkan oleh Pemeritah Kota Bandar Lampung tidak pernah mencapai angka yang telah ditetapkan, mengukur efektivitas sistem perparkiran dan mencari kendala yang dialami dalam pemungutan retribusi parkir.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Secara teoritis penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu Administrasi Negara khususnya berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, terutama Pendapatan Asli Daerah.
2. Secara praktis penelitian ini di harapkan dapat berguna sebagai bahan masukan untuk Pemerintah Kota Bandar Lampung khususnya Dinas Perhubungan dalam meningkatkan Efektivitas sistem perparkiran sehingg dapat melahirkan kebijakan guna meningkatkan hasil retribusi parkir Kota Bandar Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Keberhasilan suatu tujuan diukur juga oleh konsep efektivitas, apa yang di maksud dengan efektivitas, terdapat perbedaan pendapat di antara yang menggunakannya, baik di kalangan akademisi maupun praktisi.

Menurut Steers (1977), pada umunya efektivitas di kaitkan dengan tujuan organisasi, yaitu laba, yang cenderung menggunakan aspek terpenting dari keseluruhan prosesnya, yaitu sumber daya manusia. Steers (1977), mengatakan bahwa yang terbaik dalam meneliti efektivitas adalah memerhatikan secara serempak tiga konsep yang saling berkaitan, yaitu: (1)optimalisasi tujuan-tujuan; (2) prespektif sistem; dan (3) tekanan pada segi prilaku manusia dalam susunan organisasi. Cara seperti ini di sebut sebagai ancang-ancang saja, misalnya hanya dari segi tujuan.

Ancangan optimalisasi tujuan-tujuan memungkinkan dikenali bermacam-macam tujuan, meskipun tampaknya saling bertentangan. Kaitannya dengan optimalisasi tujuan efektivitas itu dinilai dari tujuan efektivitas itu dinilai menurut ukuran seberapa jauh organisasi mencapai tujuan yang layak dicapai

antara satu sama lain saling berkaitan. Pemutusaan perhatian kepada tujuan tujuan yang layak dicapai dan optimal, menurut Steers (1977) rupa rupanya lebih realistis untuk di maksud evaluasi, dari pada menggunakan tujuan akhir atau suatu tujuan yang diinginkan sebagai dasar ukuran.

Yang dimaksud ancangan sistem adalah menggunakan sistem terbuka, yaitu pandangan terhadap suatu organisasi yang saling bekaitan dan berhubungan dengan lingkungannya. Dalam ancangan ini perhatian lebih diarahkan pada persoalan persolan mengenai saling berhubungan, struktur, dan saling bergantung satu sama lain. Sistem ini mencakup tiga komponen, ialah input, proses, dan output. Sebagai sistem, suatu organisasi menerima input dari lingkungannya, kemudian memprosesnya, dan selanjutnya memberikan output kepada lingkungannya. Tanpa adanya input dari lingkungannya, suatu organisasi akan mati. Demikian juga *output* kepada lingkungannya, suatu organisasi akan mati. Jadi, efektivitas tidak hanya dilihat dari segi tujuan semata mata, melainkan juga segi sistem.

Komponen yang ketiga adalah prilaku manusia dalam organisasi. Ancangan ini digunakan atas dasar kenyataan bahwa tiap organisasi dalam mencapai tujuannya selalu menggunakan prilaku manusia sebagai alatnya atau suatu perusahaan dapat efektif, tetapi juga karena faktor manusianyalah suatu perusahaan tidak efektif.

Menurut Pasolong (2007:9) dalam Febriani (2017:24), efektivitas berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini dalam sebuah hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai sebab dari varaibel lain. Efektivitas berarti

tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapaiatau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.

Kemudian menurut Sedamayanti (2006:61) dalam Febriani (2017:25), Efektivitas merupakan gambaran yang memberikan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pendapat tersebut menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga dapat tercapai. Hal tersebut sangat penting perannya di dalam setiap lembaga dan berguna untuk perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga.

Menurut Gie dalam Febriani (2017:25), efektivitas adalah suatu keadaan yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang dikehendaki. Maka pekerjaan tersebut dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana dikehendaki sebelumnya.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan oleh penulis bahwa efektivitas adalah nilai keberhasilan dari sebuah usaha yang dilakukan dan suatu cerminan sejauh mana sebuah strategi telah berhasil disusun dandijalankan sehingga tujuan yang ditetapkan dalam program tersebut dapat tercapai.

2. Jenis -Jenis Efektivitas

Efektivitas itu sendiri memiliki tiga tingkatan yang berbeda, dikelompokkan pada tingkat individu, kelompok, dan organisasi sebagaimana yang didasarkan

oleh David J. Lawless dalam Gibson, Ivancevich dan Donnely (1997:25-26) dalam Evi Suryani (2016) antara lain:

a. Efektivitas Individu

Efektivitas individu didasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi.

b. Efektivitas kelompok

Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja sama dalam kelompok. Jadi efektivitas kelompok merupakan jumlah kontribusi dari semua anggota kelompoknya.

c. Efektivitas organisasi

Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. Melalui pengaruh sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya dari pada jumlah hasil karya tiap –tiap bagiannya.

3. Kriteria Efektivitas Organisasi

Menurut S.P siagian dalam bukunya Manajemen Moderen (1982:30:33) dalam Suryani (2016) mengemukakan bahwa mengukur efektivitas organisasi dapat diukur dari berbagai hal diantaranya:

a. Kejelasan tujuan yang khendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugasnya mencapai sasaran yang terarah dan tujuan-tujuan organisasi dapat tercapai.

b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “peta jalan” yang diikuti dalam upaya pencapaian sasaran-sasaran

yang telah ditentukan agar implementer tidak tersesat dalam pencapaian organisasi.

c. Proses analisa dan perumusan kebijaksanaan yang mantap berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai dan strategi yang digunakan artinya kebijaksanaan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha kegiatan oprasional.

d. Perencanaan yang matang pada hakikatnya memutuskan sekarang apa yang akan dikerjakan organisasi dimasa mendatang.

e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu di jabarkan pada pogram pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.

f. Kemampuan kerja secara produktif dengan sarana prasarana yang tersedia dan disediakan oleh organisasi.

g. Pelaksanaan yang efektif dan efesien, bagaimanapun suatu program bila tidak dilaksanakan secara efektif dan efesien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena pelaksanaan organisasi semakin melekat pada tujuannya.

h. Sistem pengawasan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas menuntut adanya sistem pengawasan dan pengendalian.

Berdasarkan pengukuran efektivitas di atas, maka peneliti menggunakan indikator-indikator untuk mengukur efektivitas menurut S.P siagian dalam bukunya Manajemen Moderen (1982:30:33) dalam Suryani (2016) karena teori

tersebut cocok untuk mengetahui ukuran efektivitas kinerja sistem perparkiran dalam upaya meningkatkan hasil retribusi parkir di Kota BandarLampung.

B. Tinjauan Tentang Keuangan Daerah

Menurut Mardiasmo (2009:2) dalam Ananta (2017:9), Keuangan Daerah atau Anggaran Daerah merupakan rencana kerja pemerintah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu. Selanjutnya Anggaran Daerah atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah instrumen utama kebijakan bagi pemerintah daerah. Sebagai mana juga di muat dalam penjelasan pasal 156 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, keuangan daerah adalah semua hak kewajiban daerah yang dapat di nilai dengan uang dan segala sesuatu berupa dengan uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemerintah Daerah yang dapat di nilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak kewajiban daerah tersebut.

Sedangkan pengertian keuangan daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka anggaran pendapatan belanja daerah.

Bedasarkan pengertian tersebut diatas, pada prinsipnya keuangan daerah memiliki unsur pokok, yaitu sebagai berikut.

a. Hak Daerah

b. Kewajiban Daerah

c. Kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.

Disamping memiliki unsur unsur pokok di atas, pengertian Keuangan Daerah selalu melekat pada pengertian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yakni suatu rencana keuangan daerah yang di tetapkan bedasrkan peraturan. Selain itu, APBD merupakan suatu alat untuk meningkatkan pelayanan publikdan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

C. Sumber Keuangan Daerah

Dalam hal sumber keuangan yang menjadi hak pemerintah daerah, Djaenuri (2012:88) dalam Ananta (2017:10) dalam bukunya mengungkapkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah menetapkan sumber-sumber penerimaan daerah, sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

   Pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapan asli daerah ini meliputi:

a) Hasil pajak daerah.

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yangdapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

b) Hasil retribusi daerah.

Retribusi daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Bagian ini dimaksudkan yaitu hasil dari pendapatan dan pengelolaan kekayaan yang ada di daerah selain dari pajak dan retribusi daerah. Contoh dari pengelolaan kekayaan daerahyang dipisahkan antara lain: bagian laba; deviden; dan penjualan saham milik daerah. Sedangkan contoh dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yakni: jasa giro; sumbangan pihak ketiga; penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah; hasil penjualan barang milik daerah; dan lain-lain.

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam

mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Dana perimbangan terdiri atas:

a) Dana bagi hasil.

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan hak daerah atas pengelolaan sumber-sumber penerimaan negara yang dihasilkan dari masingmasing daerah, yang besarnya ditentukan atas daerah penghasil (byorigin) yang didasarkan atas ketentuan perundangan yang berlaku. Secara garis besar DBH terdiri dari DBH perpajakan, dan DBH sumber daya alam (SDA).

b) Dana alokasi umum.

Dana Alokasi Umum (DAU) bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah. Termasuk didalam pengertian tersebut adalah jaminan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan di seluruh daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan merupakan satu kesatuan dengan penerimaan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah.

c) Dana alokasi khusus.

Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhab khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. DAK digunakan khusus untuk membiayai investasi pengadaan atau peningkatan atu perbaikan prasarana dan sarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Dalam keadaan tertentu

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah, antara lain adalah hibah atau penerimaan dari daerah provinsi atau daerah kabupaten/ kota lainnya, dan pemerintahan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya dana darurat. Untuk keperluan mendesak, kepada daerah tertentu diberikan dana darurat. Keperluan mendesak, maksudnya terjadi keadaan yang sangat luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh daerah dengan pembiayaan dari APBD, misalnya terjadinya bencana alam dan/ atau peristiwa lain yang dinyatakan oleh pemerintah pusat sebagai bencana nasional. Prosedur dan tata cara penyaluran dana darurat sesuai bdengan ketentuan yang berlaku bagi APBN.

D. Tinjauan Tentang Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah adalah pendaptan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerahadalah sebagai berikut:

1. Pajak Daearah adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan lansung yang seimbang, yang dapat dipaksakan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai urusan pemerintah daerah.

2. Retribusi Daerah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
3. Pengelolaan kekayaan yang dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan APBD. Jika atas pengelolaan tersebut memperoleh laba, laba tersebut dapat dimasukan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. hasil pengelolaan kekyaan daerah yang dipisahkan mencakup:
    a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
    b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/Badan Usaha Milik Negara (BUMN); dan
    c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
4. Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerahdan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan. Contoh dari lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah sebagai berikut.
    a. Hasil penjualan daerah yang dipisahkan;
    b. Jasa giro;
    c. Pendapatan bunga;
    d. Penerimaan atas ganti kerugian daerah;

e. Penerimaan Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa daerah;

f. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;

g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan ;

h. Pendapatan denda pajak;

i. Pendapatan denda retribusi;

j. Pendapatan atas hasil eksekusi atas jaminan;

k. Pendapatan dari pengambilan;

l. Fasilitas sosial dan fasilitas umum;

m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan pelatihan.

E. Tinjauan Tentang Retribusi

1. Pengertian Retribusi Daerah

Pada dasarnya, retribusi daerah lebih beragam dan bervariasi antara daerah kabupaten yang satu dengan yang lainnya. Semakin berkembang suatu daerah semakin banyak fasilitas atau jasa pelayanan yang disediakan pemerintah daerah setempat untuk mengembangkan perekonomian masyarakat, sehingga semakin banyak jenis retribusi yang dapat dipungut daerah tersebut.

Menurut S. Prawirahardjono (1984:202) dalam Adimasta (2011:109), retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah baik lansung maupun tidak lansung.

Sudargo (1980: 62) dalam Raharjo Adimasta (2011:109) juga berpendapat bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.

Adapun menurut Widjaya (1992:80) dalam Raharjo Adimasta (2011), retribusi merupakan harga dan pelayanan lansung dari pemerintah daerah ditingkatkan kualitas pelayanannya harus baik dan menarik.

Retribusi daerah sebagaimana pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang di harapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggara pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat, Menurut Ahmacd Yani (2002) dalam Ananta (2017:19)“ Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota diberi peluang untuk menggali sumber sumber keuangan dengan menetapkan jenis retribusi yang telah di tetapkan sepanjang memenuhi kriteria yang telah di tetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Menurut Siahaan (2013) dalam Ananta (2017:19) ‘’Retribusi Daerah merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang khusus di sediakan dan di berikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan” jasa adalah kegiatan pemerintah yang berupa pelayanan yang menyebabkan barang fasilitas, atau manfaat lainnya, dapat di nikmati oleh orang pribadi atau badan, dengan demikian bila seseorang menikmati barang atau jasa yang di sediakan pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi sesuai dengan ketetapan yang berlaku.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bahwa retribusi adalah pungutan yang dilakukan berhubungan dengan jasa fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara lansung dan nyata kepada masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ciri pokok retribusi adalah: (a) Pungutan yang dilakukan pemerintah daerah; (b) Pengenaan pungutan bersifat imbal prestasi atas jasa yang diberikan pemerintah daerah; dan (c) Dikenakan kepada orang yang memanfaatkan jasa yang disediakan pemerintah daerah.

Objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, namun hanya jenis jasa tertentu menurut pertimbangan sosisal ekonomi layak untuk dijadikan objek retribusi.

2. Penggolongan Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, retribusi daerah dapat digolongkan sebagai berikut.

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan. Retribusi Jasa umum ditetapkan berdasarkan kegiatan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang akan menjadi objek permasalahan

dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis termasuk kedalam Retribusi Jasa Umum.

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan sektor swasta. didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengwasan atas pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

3. Kebijakan Umum Perparkiran di Kota Bandar Lampung

Retribusi perparkiran di Kota Bandar Lampung diatur dengan peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Beberapa pasal yang menjelaskan retribusi jasa umum adalah: pasal 24 Nama, objek dan subjek Retribusi dengan nama retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan jasa tempat parkir di tepi jalan umum yang ditentukan dan diselenggarakan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pasal 25 yang berbunyi sebagai berikut.

(1) Objek Retribusi pelayanan parkir di tepi Jalanan Umum adalah penyedian pelayanan parkir yang di tentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

(2) Jalanan Umum di maksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam dua zona (3) pembagian zona sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan kepada tingkat kepadatan lalu lintas dan letak strategis wilayah.

(3) Pengaturan lebih lanjut mengenai zona sebagamana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dalam peraturan Walikota."

Pada Pasal 28 Peraturan Daerah tertulis sebagai berikut.

(1) Struktur besarmya tarif parkir di tepi Jalan Umum ditetapkan berdasarkan zona,lama parkir atau durasi berlangganan.

(2) Prosedur pembayaran parkir sebagai mana diatur dalam ayat (1) disediakan kedalam dua pilihan yaitu dengan membayarkan besaran tarif progresif atau berlangganan

(3) Pilihan atas prosedur pembayaran di maksud dalam ayat (2) diserahkan secara mutlak kepada wajib retribusi untuk di pilih.

(4) Dalam rangka menerima pembayaran tarif sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dengan memperhatikan prinsip prinsip dasar retribusi

F. Tinjauan Tentang Perparkiran

Menurut Tamin (2008) parkir merupakan salah satu unsur sarana yang tidak dapat dipisahkan dari sistim transpotasi jalan raya secara keseluruhan. Sedangkan pengertian umum tentang parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara (Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 1996). Kendaraan yang tidak bergerak terus menerus, pada saatnya harus berhenti sementara atau berhenti lama (parkir), yaitu keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara (PP. No. 43, 1993).

Perparkiran berkaitan erat dengan kebutuhan ruang, sedangkan persediaan ruang terutama pada daerah perkotaan sangat terbatas bergantung pada luas wilayah kota yang tersedia, tata guna lahan, dan dibagian wilayah kota mana yang cocok dijadikan fasilitas parkir. Bila ruang parkir dibutuhkan dan di wilayah pusat kegiatan, maka ketersediaan lahan merupakan masalah yang sangat sulit kecuali dengan merubah sebagian peruntukannya. Setiap pelaku lalu lintas mempunyai kepentingan parkir yang berbeda dan menginginkan fasilitas parkir sesuai dengan kepentingannya. Menurut Warpani (1980) kebutuhan tempat parkir adalah fungsi dari kegiatan. Keinginan para pemarkir inipatut diperhatikan oleh penyedia tempat parkir dalam merencanakan dan merancang fasilitas parkir.

1. Fasilitas Parkir

Fasilitas parkir bertujuan untuk memberikan tempat istirahat bagi kendaraan dan untuk menunjang arus lalu lintas kendaraan. Menurut Direktorat Jendral Perhubungan Darat ada dua jenis penempatan faslitas parkir yaitu sebagai berikut.

a. Parkir di Badan Jalan (*On the Street Parking)* merupakan tempat yang biasanya paling jelas dan paling cocok bagi pengemudi untuk memarkirkan kendaraannya ialah di tepi jalan. Tetapi parkir seperti ini mempunyai banyak kerugian. Pertama arus lalu lintas semakin terhambat, yang akhirnya menimbulkan kemacetan dan kelambatan bagi seluruh kendaraan.

   Pada kondisi yang berhimpit akan lebih terlihat penurunan kelancaran lalu lintasnya. Parkir dijalan juga mengakibatkan peningkatan jumlah kecelakaan akibat gerakan membuka pintu mobil, tingkah pengguna pengendara motor yang tidak menentu dan pejalan kaki yang muncul diantara kendaraan parkir. Meskipun terdapat berbagai kerugian, namun parkir badan jalan masih sangat diperlukan karena banyak tempat (perkotaan, sekolah, tempat ibadah, dll) tidak mempunyai tempat parkir memadai.

b. Parkir di luar Badan Jalan (*off Street parking)* terdapat di kawasan pusat kota, parkir di pinggir jalan sangat dibatasi sehingga diperlukan penyediaan fasilitas di luar daerah jalan. Ada beberapa klasifikasi parkir di luar daerah jalan yaitu sebagai berikut

   1. Pelataran parkir permukaan tanah;
   2. Garasi bertingkat; dan
   3. Garasi bawah tanah
   4. Gabungan
   5. Garasi mekanis

2. Penggolongan Parkir Berdasarkan Status

Menurut statusnya parkir digolongkan menjadi 3 yaitu sebagai berikut.

a. Parkir Umum

Parkir umum adalah perparkiran yang menggunakan tanah-tanah, jalan-jalan, lapangan yang dimiliki atau dikuasai dan penyelengaraannya dikelola pemerintah.

b. Parkir Khusus

Perparkiran mengunakan tanah-tanah yang dikuasai dan pengeloaannya dilakukan pihak ketiga.

c. Parkir Darurat

Perparkiran di tempat umum baik yang menggunakan lahan, jalan, lapangan milik, dan penguasaannya oleh pemerintah daerah atau swasta karena kegiatan insentil.

d. Taman Parkir

Suatu area atau bangunan perparkiran yang dilengkapi sarana perparkiran yang pengelolaannya diselengarakan pemerintah.

e. Gedung Parkir

Bangunan yang dimanfaatkan untu tempat parkir kendaraannya yang penyelengaraannya oleh pemerintah daerah tau pihak ketiga yang mendapatkan izin pihak ketiga.

G. Keaslian Penelitian

Untuk melihat penelitian-penelitan yang telah dilakukan terkait dengan retribusi perparkiran, berikut peneliti sajikan matriks perbandingan penelitian terdahulu.

Tabel 2. Matriks Perbandingan Penelitian

	Penelitian Pertama	**Penelitian Kedua**	**Penelitian Ketiga**	**Penelitian Keempat**
Nama	Rezki Ananta	Leni Novelina	Muhamad Adi Suhendra	Ismail Dwi Saputra
Judul	Pengelolaan Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung	Strategi Dinas Perhubungan Dalam Pemungutan Retribusi Parkir Kota Bandar Lampung	Evaluasi Pemungutan Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Di Kota Makasar
Tujuan	1. Mendeskripsikan Dan Menganalisis Tentang Pengelolaan Parkir 2. Mendeskripsikan Hambatan-Hambatan Pengelolaan Parkir	Untuk Mengetahui Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Pemungutan Retribusi Parkir	Untuk Mengevaluasi Pemungutan Retribusi Parkir	Untuk Mengetahui Pengelolaan Retribusi Parkir di Perusahaan Daerah Makasar dan untuk Mengetahui Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Parkir
Fokus	1. Untuk Mengetahui Pengelolaan Parkir dengan teori manajemen Perencanaan, pengorganisasia, Pengawasan	1. Untuk mengetahui perencanaan target dan potensi PAD 3. Strategi berdasarkan arah pengelolaan PAD	1. Untuk melihat Evaluasi pemungutan retribusi parkir dengan menyoroti efektivitas, efesiensi,	1. Untuk melihat pengelolaan retribusi parkir kota makasar dengan melihat masalah pengelolaan retribus.

			kecukupan.	2. Untuk mengkur teori manajemen Perencanaan, pengorganisa-sian, penggerakan, pengawasan
Hasil	Berdasarkan hasil analisa bahwa pengelolaan retribusi parkir di Kota Bandar Lampung belum maksimal maka ditarik kesimpulan 1. Dalam proses perencanaan terjadi ketidak sesuaian antara Perwali NO. 83 Tahun 2011 dengan pelaksanaan di lapanagn 2. Di dalam funsi pengorganisasian telah terjadi penyalah gunaan 3. Fungsi pengarahan telah berjalan dengan baik walaupun belum maksimal.	Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penarikan retribusi parkir telah dilakukan dengan baik, upaya pemungutan retribusi berorientasi pada fungsi retribusi namun dishub belum melakukannya dengan baik, faktor yang berpengaruh terhadap pemungutan retribusi yaitu: perangkat hukum di daerah terutama keberadaan perda yang usang sehingga target yang ditentukan sulit direalisasikan serta konsistensi penegak hukum kurang tegas terhadap pihak birokrat yang bermain nakal.	Berdasarkan hasi evaluasi pemungutan retribusi parkir yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan PAD adalah sebagai berikut: 1. Pemungu-tan retribusi dilakukan secara efektif yaitu dengan meningka-tkan strtegi perparkir-an dan meningkat kan efesiensi 2. Dinas Perhubun-gan Kota Bandar Lampung bekerja secara efesien dengan melengka-pi sarana komputer-	Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa fungsi manajemen yang dilakukan perusahaan daerah makasar menemui beberapa permasalahan yaitu: 1. Perencanaan target retribusi parkir belum tercapai. 2. Didalam pengorganisa-sian jumlah personel penarikan retribusi parkir tidak sesuai dengan jumlah kantung parkir. 3. Kepala bidang penerimaan retribusi parkir kurang melakukan fungsi penggerkan. 4. Kurangnya pengawasan sehingga petugas paenarikan retribusi parkir terus bermain curang.

			isasi dan memben-tuk UPTD Parkir	

Sumber: Diolah Oleh Peneliti

Penelitian mengenai efektivitas sistem perparkiran dalam upaya peningkatan restribusi parkir Bandar Lampung studi kasus Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung merupakan hasil karya penulis dan belum pernah diteliti menggunakan teori efektivitas sebelumnya. Penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang mengapa target pendapatan retribusi parkir Kota Bandar Lampung tidak pernah tercapai, bagaimana efektivitas sistem perparkiran Dinas Perhubungan Kota BandarLampung dan kendala yang dialami dalam proses pemungutan retribusi.

H. Kerangka Pikir

Pemungutan retribusi merupakan salah satu cara pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, yang digunakan untuk membiayai semua urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan belanja daerah. pada saat melakukan pemungutan tersebut harus dilakukan secara efektif sehingga target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dapat tercapai. Kota Bandar Lampung merupakan salah satu wilayah kota madya yang terus menggali dan mengembangkan potensi sumber Pendapatan Asli Daerah.

Retribusi pelayanan parkir adalah satu jenis retribusi umum yang pelaksanaannya di Kota Bandar Lampung diatur pada Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. Tercapai atau tidak terget pendapatan

retribusi parkir tersebut sangat bergantung pada efektivitas sistem perparkiran yang dilakukan para petugas.

Berdasarkan hal di atas, maka penulis ingin mengukur tentang bagaimana efektivitas sistem perparkiran dalam meningkatkan hasil retribusi parkir Kota Bandar Lampung pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

Gambar 1. Kerangka Pikir

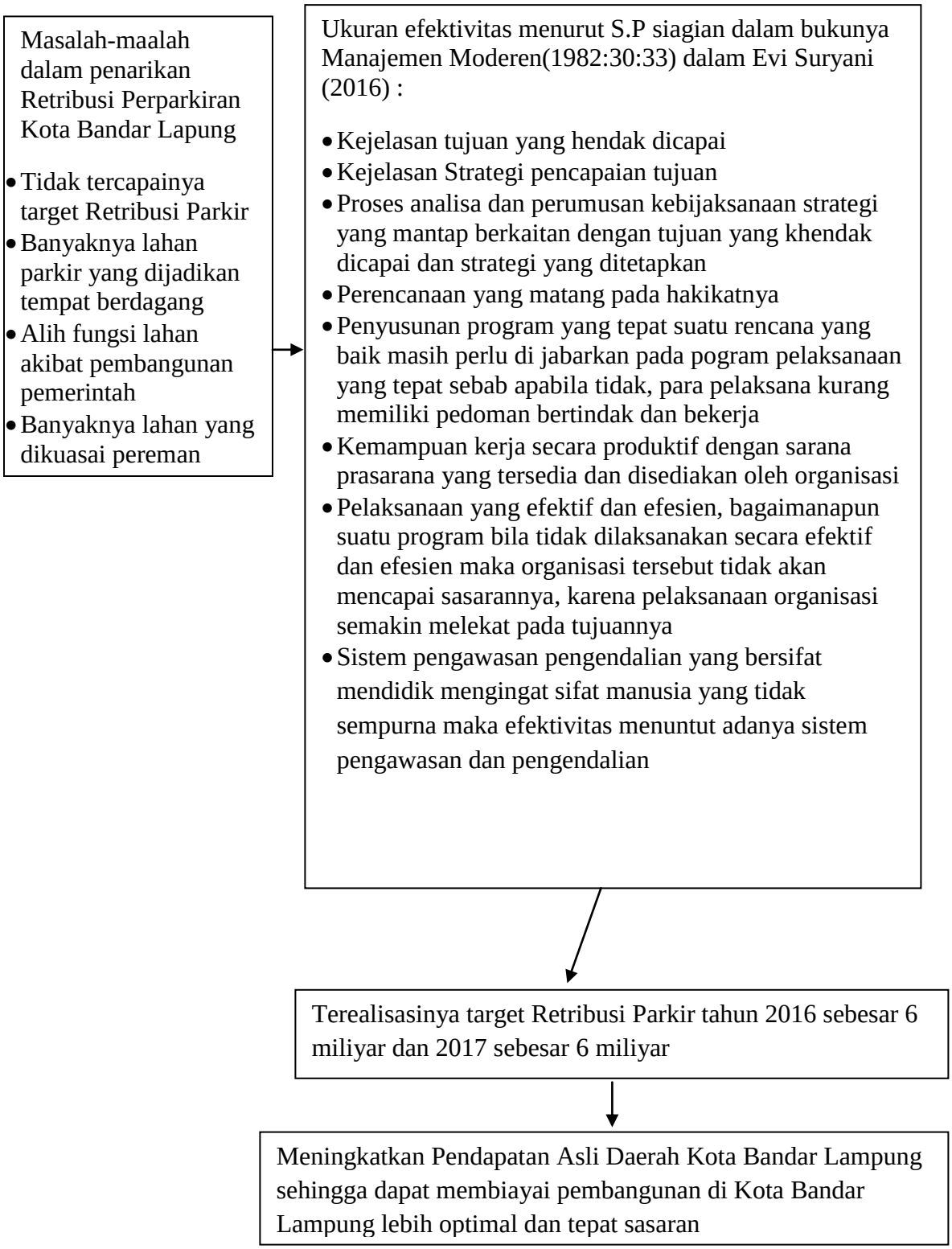

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2018

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor (2010) dalam Ananta (2017:27) berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, dimana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Data yang dikumpulkan tersebut berupa kata-kata hasil wawancara, gambar, cacatan di lapangan, foto, atau dokumen pribadi. Sementara itu Strauss dan Corbin dalam Ananta (2017:27) memberikan gambaran bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara lain keantifikasi (pengukuran).

Penelitian kualitatif menunjukkan penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku juga tentang fungsionalisasi organisasi, pergerakan-pergerakan sosial, atau hubungan kekerabatan. Dengan kata lain metode deskriptif menggambarkan suatu fenomena yang ada dengan jalan memaparkan data secara kata-kata dan gambar. Penulis akan menggunakan metode ini dengan maksud ingin mendeskripsikan dan memperoleh pemahaman menyeluruh dan mendalam tentang

penyebab tidak pernah tercapainya target penerimaan retribusi parkir di Kota BandarLampung.

B. Fokus Penelitian

Dalam sebuah penelitian, fokus penelitian menjadi suatu menjadi suatu hal yang sangat penting karena fokus penelitian dapat memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitiannya. Fokus penelitian juga sangat perlu guna untuk membantu peneliti dalam membuat keputusan yang tepat mengenai data-data yang akan dikumpulkan dilapangan. Menurut Moleong (2007) dalam Ananta (2017:28) dalam penelitian kualitatif hal yang harus diperhatikan adalah masalah dan fokus penelitian. Fokus memberikan batasan dalam studi dan batasan dalam pengumpulan data, sehingga dengan batasan ini peneliti akan fokus memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian.

Berdasarkan penjelasan Moleong (2007:43) dalam Ananta (2017:28), maka fokus yang digunakan untuk mengukur efektivitas sistem perparkiran guna meningkatkan hasil retribusi parkir di Kota Bandar Lampung dengan menggunakan pengukuran efektivitas menurut S.P siagian (1982:30:33) dalam Evi Suryani (2016:11) mengemukakan bahwa mengukur efektivitas organisasi dapat diukur dari berbagai hal diantaranya:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai:

   Para petugas pemungut retribusi parkir seyogyanya mengetahui target yang akan dicapai, serta Dinas Perhubungan menyosialisasikan kepada masyarakat tentang

pentingya membayar retribusi parkir, kegunaanya dan Renstra yang digunakan untuk mencapai target retribusi parkir tersebut.

2. Kejelasan Strategi pencapaian tujuan:

   Para petugas yang terlibat didalam pemungutan retribusi parkir memahami strategi yang digunakan dalam mencapai target yang ditetapkan serta Dinas Perhubungan melakukan pelatihan bagi Bidang yang terlibat didalam pemungutan retribusi parkir dan petugas pemungutan retribusi parkir.

3. Proses analisa dan perumusan kebijaksanaan strategi yang mantap berkaitan dengan tujuan yang khendak dicapai dan strategi yang ditetapkan:

   Kegiatan operasional dilapangan mengarah kepada tujuan yang hendak dicapai serta, pihak pimpinan memberikan tekanan kepada bawahan yang menaungi pemungutan retribusi parkir tersebut untuk memaksimalkan kegiatan operasional dilapangan agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai.

4. Perencanaan yang matang pada hakikatnya:

   Strategi yang digunakan untuk mendongkrak retribusi parkir ditahun mendatang telah disusun sekarang, dan strategi tersebut disusun dengan melihat dan mengoreksi strategi yang digunakan pada tahun sebelumnya.

5. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu di jabarkan pada pogram pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja:

   Para petugas yang menaungi bagian pemungutan retribusi parkir telah mengerti secara persis tata cara pemungutan retribusi parkir.

6. Kemampuan kerja secara produktif dengan sarana prasarana yang tersedia dan disediakan oleh organisasi:

   Sarana prasarana yang digunakan dalam pemungutan retribusi parkir tersedia secara lengkap.

7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun suatu program bila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena pelaksanaan organisasi semakin melekat pada tujuannya:

   Target penerimaan retribusi parkir yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan kurun waktu yang telah ditentukan dengan sumber daya alam yang tersedia, serta diberikannya *reward* dari pimpinan sebagai hadiah atas tercapainya target penerimaan retribusi tersebut.

8. Sistem pengawasan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas menuntut adanya sistem pengawasan dan pengendalian:

   Dilakukannya peninjauan oleh Walikota Bandar lampung untuk melihat sejauhmana *progress* yang telah dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam hal pemungutan retribusi parkir, serta Kepala Dinas Perhubungan meninjau lansung kebawah untuk melihat dan mengawasi kegiatan pemungutan retribusi parkir.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti akan melakukan penelitian. Lokasi penelitian ini dipilih menurut kriteria-kriteria tertentu. Menurut Sugiyono (2011) dalam Ananta (2017:30) *purposive* adalah lokasi penelitian dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dan diambil berdasarkan tujuan penelitian. Sedangkan Menurut Moleong (2007) dalam Ananta (2017:30) mendefinisikan lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan di dalam lingkup wilayah Kota BandarLampung yakni khususnya di Dinas Perhubungan Kota BandarLampung. Dinas Perhubungan Kota BandarLampung dipilih sebagai lokasi penelitian karena Dinas Perhubungan Kota BandarLampung merupakan instansi yang mengurusi pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kota BandarLampung.

D. Informan Penelitian

Menurut Sugiyono (2011) dalam Ananta (2017:30), informan adalah orang-orang yang benar-benarmengetahui dan atau terlibat langsung dalam fokus permasalahan sehingga peneliti merangkum informasi yang penting dalam fokus penelitian. Untuk memperoleh data guna kepentingan penelitian serta adanya hasil yang representatif, maka diperlukan informan kunci yang memahami dan mempunyai kaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Informan kunci atau informan awal

dipilih secara *purposive sampling*, sedangkan selanjutnya ditentukan dengan cara *snowball sampling* yaitu dipilih secara bergulir sampai menunjukkan tingkat kejenuhan informasi. Informan peneliti dalam melakukan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

Tabel 3. Daftar Informan

No	Nama	Jabatan
1	Afruly, S.Sos., M.M	Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung
2	Wahab	Petugas Pemungut Retribusi Parkir Pasar Gintung Jl. Imam Bonjol
3	Burhan	Petugas Pemungut Parkir Jl. Pangkal Pinang
4	Ain Kurni	Petugas Pemungut Parkir Jl. Ikan Hiu
5	Diki	Masyarakat pengguna parkir Jl. Ikan Hiu

Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2018

E. Jenis dan Sumber Data

Data adalah catatan atas kumpulan fakta yang ada, merupakan hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata atau citra. Menurut Loftland dalam Moleong (2007) dalam Ananta (2017:32) sumber data utama penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Data Primer

Data primer yaitu berupa kata-kata dan tindakan informan serta peristiwa-peristiwa tertentu yang berkaitan dengan fokus penelitian yang semuanya berkaitan dengan permasalahan, pelaksanaan, dan merupakan hasil pengumpulan peneliti sendiri selama berada di lokasi penelitian. Data primier diperoleh peneliti selama proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan observasi. Wawancara dalam penelitian ini berkaitan dengan kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan, proses analisa dan perumusan strategi yang berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai, perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat, kemampuan kerja secara produktif dengan sarana prasarana yang tersedia, pelaksanaan yang efektif dan efesien yang melekat pada tujuan, sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif serta pencapaian target retribusi pelayanan parkir, kontribusi pendapatan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum terhadap PAD Kota Bandar Lampung.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data tertulis yang digunakan sebagai informasipendukung dalam analisis data primer. Data ini pada umumnya berupa dokumen-dokumen tertulis yang terkait efektivitas parkir tepi jalan umumdi Kota Bandar Lampung. Data sekunder yang dipakai peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah :

Tabel 4. Daftar Dokumen

No.	Nama Dokumen
1.	Tabel Realisasi PAD Dishub Kota Bandar Lammpung
2.	Profil Dishub Kota Bandar Lampung
3.	Perwali No. 83 Tahun 2011
4.	Surat Perintah Tugas

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat sehingga mampu menjawab permasalahan penelitian, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalampenelitian ini adalah sebagai berikut.

a) Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi dan ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Seperti diungkapkan oleh Easterberg dalam Ananta (2017:33) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna suatu topik tertentu. Dalam penelitianini, peneliti mewawancarai beberapa informan yang dianggap sebagai kunci. Wawancara dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dan alur kebijakan perparkiran tepi jalan umum di Kota Bandar Lampung. Wawancara dilakukan dengan metode tanya jawab antara peneliti dan informan, dalam penelitian ini peneliti mewawancarai beberapa informan seperti Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, petugas parkir, dan juga masyarakat yang mana sebagai pengguna jasa parkir di Kota Bandar Lampung.

b) Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2011) dalam Ananta (2017:34),dokumen merupakancatatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitaif. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan data berupa dokumenresmi, literaturpendukung, dan juga dokumen berupa foto-foto.

c) Observasi

Observasi digunakan untuk memperoleh data dengan cara melakukan pengamatan secara sistematis pada obyek penelitian. Pengamatan langsung di lapangan dilakukan untuk mengetahui kondisi dan lokasi penelitian. Nasution dalam Ananta (2017:34) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmupengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan pengamatan lansung di lapangan, beberapa lokasi berikut ini:

Tabel. 5 Observasi Penelitian

No.	Lokasi Observasi	Waktu Observasi
1.	Jalan. Imam Bonjol Pasir Gintung	2-Februari-2018
2.	Jalan. Pangkal Pinang	2-Februari-2018
3.	Jalan. Ikan Hiu	2-Februari-2018

Sumber: Diolah Oleh Peneliti

Pemilihan kedua lokasi observasi tersebut dikarenakan beberapa alasan, yaitu : kedua lokasi tersebut adalah merupakan sample dari masing-masing zona lokasi

parkir menurut Perwali No. 83 Tahun 2011 dan kedua lokasi tersebut merupakan lokasi parkir yang dominan paling ramai dari masing-masing zona.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Bodgan & Biklen dalam Ananta (2017:35) analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Sementara itu menurut Sugiyono (2011) dalam Ananta (2017:35), bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, gambar, foto dan sebagainya dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, kemudian membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif yaitu:

a. Reduksi Data (*reduction data*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Data yang diperoleh dilokasi penelitian kemudian dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan lapangan selanjutnya direduksi,dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang

penting kemudian dicari tema atau polanya. Data yang sudah diperoleh dipilah pilah dan dirangkum untuk kemudian dicocokkan kembali dengan fokus penelitian ini. Contohnya data yang direduksi adalah realisasi PAD tahun 2016 mulai dari periode januari sampai desember.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang bergunauntuk memudahkan peneliti memahami gambaran secara keseluruhanatau bagian tertentu dari penelitian. Dengan menyajikan data maka dapat memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Batasan yang diberikan dalam penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, penyajian data diwujudkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, bagan, foto atau gambar. Semua itu dirancang guna mengumpulkan informasi yang tersusun dan mudah dipahami.

Dalam penelitian ini maka peneliti menyajikan data dalam bentuk teks deskriptif untuk mempermudah pembaca memahami secara praktis, data tersebut berupa hasil wawancara yang dilakukan di Dinas Perhubungan, petugas parkir, serta masyarakat diikuti dengan menyajikan tabel, dokumen-dokumen dan foto atau gambar sejenisnya untuk memperjelas data tersebut sehingga nantinya akan dapat mempermudah peneliti untuk menarik suatu kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian

dan selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, yang kemudian dituangkan dalam kesimpulan Penarikan kesimpulan juga dapat diartikan sebagai proses perumusanmakna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat, padat, dan mudah dipahami, serta dilakukan dengan cara berulangkali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah yang ada.

H. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data adalah cara menyelaraskan antara data yang dilaporkan penelitian dengan data yang terjadi pada obyek penelitian. Teknik keabsahan data dilakukan untuk mendapatkan data yang valid. Berdasarkan teknik-teknik keabsahan, maka peneliti menggunakan teknik keabasahan data Derajat kepercayaan, dengan menempuh teknik:

a. Kecukupan Refrensi

Kecukupan refrensi yang dimaksud di sini adalah adanya alat pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, kecukupan refrensi yang peneliti gunakan yaitu barupa alat perekam wawancara. Rekaman wawancara tersebut peneliti gunakan untuk mendukung dan memudahkan peneliti dalam mencatat data dan membandingkan data yang peneliti kumpulkan dan dapatkan dari para informan di lapangan. Sehingga

bahan-bahan yang tercatat dan terekam dapat digunakan sebagi patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data.

b. Triangulasi

Teknik triangulasi merupakan proses membandingkan dan mengecek tingkat kepercayaan informan melalui proses wawancara dan studi dokumentasi. Hasil wawancara dan studi dokumentasi dikumpulkan berdasarkan derajat kesamaan informasi, sehingga data yang diperoleh memiliki keselarasan dan kepercayaan yang sesuai.

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah teknik menguji data dan informasi dengan mencari data yang sama dengan informan satu dan lainnya. Data dari informan akan dikomplikasikan dengan hasil dokumentasi yang memiliki kesamaan informasi. Teknik triangulasi sumber bertujuan untuk memperoleh data yang sama dan memiliki tingkat validitas yang tinggi.

Tabel. 6 Contoh Tabel Kriteria Efektivitas

No.	Informan	Wawancara	Observasi	Dokumen
1.	Afruly.,S.sos Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.	Tarif parkir kendaraan roda empat sebesar Rp2.500 pada satu jam pertama. Lewat dari satu jam pertama dikenakan retribusi Rp1.500 per jamnya. Jadi nggak boleh menarik retribusi Rp4.000 untuk parkir dua jam. Harusnya hanya dikenakan Rp1.500 setiap melebihi satu jam selanjutnya. Tarif retribusi parkir kendaraan roda dua yang setelah dua jam pertama sebesar Rp1.500, maka kelebihannya dikenakan Rp1.000 untuk satu jam pertama	Peneliti melakukan observasi ke lapangan dan menemukan bahwa kenyataan di lapangan terkait dengan ketetapan dari tarif parkir tidak dijalankan sebagaimana yang tertera di Peraturan Wali kota Bandar Lampung no. 83 tahun 2011. Dilapangan parkir dipungut hampir merata yakni Rp 2.000 sekali parkir untuk kendaraan roda dua baik itu sebentar maupun lama dalam sekali parkir.	Perwali No. 83 Tahun 2011 dan photo dokumentasi (terlampir pada lampiran)

Sumber :Diolah Oleh Peneliti

V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa pada Evektivitas sistem perparkiran dalam upaya meningkatkakan hasil retribusi parkir kota Bandar Lampung belum efektif dan terlaksana dengan baik. Berikut adalah kesimpulan yang di sajikan oleh peneliti:

1. Kurangnya pengawasan terhadap petugas parkir dilapangan, pengawasan yang dilakukan hanya pada waktu-waktu tertentu saja menyebabkan petugas parkir bekerja secara asal-asalan, serta terjadi kerjasama antara petugas parkir liar dan oknum tertentu yang memiliki peranan sehingga kegiatan pemungutan uang parkir tanpa mengantongi Surat Perintah Tugas masih bebas berkeliaran sehingga target yang tercapai hanya sekitar 65% dan 35% belum tercapai, sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar Retribusi Parkir dan kegunaanya belum pernah dilakukan sehingga kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi parkir masih rendah. Alokasi anggaran untuk biaya operasional yang digunakan untuk menjalankan tugas sehari-hari tidak ada. dan Kurang memadainyas prasarana yang dimiliki seperti kurang luasnya lahan parkir sehingga kemacetan masih sering terjadi.

Berkaitan dengan kendala-kendala yang dihadapi dalam Evektivitas sistem perparkiran dalam upaya meningkatkakan hasil retribusi parkir kota Bandar Lampung, penulis mengelompokkan menjadi dua yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Adapun kendala-kendala tersebut diantaranya sebagai berikut:

a. Kendala Internal yang dhadapi diantaranya : kurang disiplinya sumber daya manusia yang dimiliki. Pengawasan yang dilaksanakan hanya berfokus kepada besaran nilai pencapaian target tetapi tidak berfokus kepada proses-proses secara keseluruhan.
b. Kendala Eksternal yang dihadapi diantaranya : masih rendahnya kesadaran masyarakat yang mentaati kebijakan Pemerintah untuk membayar Retribusi Parkir.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang diberikan oleh peneliti sebagai berikut :

1. Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung sebaiknya memasang kamera CCTV pada setiap kantong parkir agar gerak gerik petugas parkir dapat terpantau secara jelas setiap saat.
2. Pemerintah seharusnya membenahi kondisi internal contohnya kedisiplinan para pegawai pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung terlebih dahulu untuk membersihkan praktik pungutan liar yang menyebabkan kebocoran PAD.

3. Pemerintah seharusnya mengalokasikan anggaran untuk biaya operasional pegawai sebesarb 25% untuk menjalankan tugas di lapangan.
4. Aparat semestinya menjalankan arahan-arahan yang diberikan secara baik terkait arahan yang diberikan, contohnya seperti melakukan penarikan retribusi parkir sesusai dengan Perwali No. 83.
5. Hendaknya pemerintah meningkatkan prasarana yang dimiliki agar masalah kemacetan akibat aktivitas perparkiran dapat terselsaikan, contohnya memperluas lahan parkir.
6. Membentuk asosiasi pengelola parkir yang terdiri dari para pengelola / pemilik gedung komersial Membuat kesepakatan bersama seperti meningkatkan fasilitas pelayanan perparkira untuk meningkatkan penerimaan retribusi dan para perusahaan jasa pengelola parkir.
7. Hendaknya Dinas Perhubungan Kota BandarLampung memberikan punishment yang tegas bagi aparat yang tidak menjalankan tugasnya dengan sesuai, contohnya pemberhentian untuk petugas parkir serta pegawai honorers dan mutasi untuk oknum PNS

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo. 2010. *Pengelolaan Pendapatan &Anggaran Daerah.* Makassar: Graha Ilmu.

Budiani, Ni Wayan. 2007. Efektivitas Penuntasan Pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti. *Denpasar Jurnal Ekonomi dan Sosial Volume 2, No. 1*, diunduh dari https://ojs.unud.ac.idpada tanggal 16 Oktober 2017.

Ernawati. 2016. *EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL PLAZA BANDAR JAYA, LAMPUNG TENGAH. Skripsi.*Lampung: FISIP Universitas Lampung

Evi, Suryani. 2016. *Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Dinas Pendapatan Kabupaten Pesawaran. Skripsi.*Lampung: FISIP Universitas Lampung

Febriani, Kartika. 2017. *Efektivitas Program Pelayanan Kesehatan Gratis (P2KM) Di Kota Bandar Lampung. Skrpsi.*Lampung: FISIP Universitas Lampung.

Melati, Lie. 2015. *Efektivitas Pengukuran Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Palopo.Skripsi.* Makasar Fisip Universitas Hasanudin

Moloeng,Lexy J.2007. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung. PT. Remaja Rosda Karya

Dokumen

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006

Peraturan walikota No. 83

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

Rezki Ananta. 2017. *Pengelolaaan Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.*Skripsi. Lampung: Universitas Lampung.

Sutrisno, Edy. 2010. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Kencana Perdana Media.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kuantitatif, dan R&D,* Bandung Alfabeta

Tresiana, Novita. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandar Lampung: Univeritas Lampung

Wahdan, Yaumil. Farida, Ida. Permana, Sulwan. 2014, Analisis Karakteristik Pada Badan Jalan Dan Dampaknya Terhadap Lalu Lintas Volume 13, No. 1, http://download.portalgaruda.org/article.php? 16 Oktober 2017.

Yani, Achmad. 2008. *Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Website

e-journal.uajy.ac.id

http://e-journal.uajy.ac.id